



PENGARUH TRANSPARANSI, KEMUDAHAN PENGGUNAAN, DAN EFEKTIVITAS TERHADAP PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI *E-GOVERNMENT*

Aryanto Nur¹, Dimas Wijanarko², Achmad Dhafikrie Solahuddin,
Haykal Alvito Wibowo⁴, Habillah Hasbi Maulana⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Teknik & Informatika, Universitas Bina sarana Informatika

¹aryantonur@yahoo.com, ²dmswijanarko@gmail.com, ³fikridhafikri@gmail.com,

⁴haykal.wibowo01@gmail.com, ⁵habillahhasbi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi, kemudahan penggunaan, dan efektivitas terhadap pencegahan korupsi melalui e-government. Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Implementasi e-government dianggap sebagai inovasi strategis untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, yang pada akhirnya dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan data diperoleh melalui kuesioner berbasis skala Likert yang disebarkan kepada 50 responden dari berbagai wilayah di Indonesia. Responden terdiri dari masyarakat umum, pegawai pemerintah, dan pelaku usaha yang menggunakan layanan e-government. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS, yang mencakup uji validitas, reliabilitas, analisis deskriptif, dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, kemudahan penggunaan, dan efektivitas memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan korupsi. Variabel kemudahan penggunaan memiliki pengaruh terbesar, diikuti oleh transparansi dan efektivitas. Model regresi linier berganda yang dihasilkan mampu menjelaskan 85% variasi dalam pencegahan korupsi, yang menegaskan pentingnya ketiga variabel tersebut dalam mendukung keberhasilan implementasi e-government. Penelitian ini menyimpulkan bahwa e-government merupakan solusi strategis dalam pemberantasan korupsi, terutama melalui penyediaan layanan publik yang transparan, mudah digunakan, dan efektif. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan desain sistem yang ramah pengguna, menyediakan akses informasi yang terbuka dan terintegrasi, serta memastikan bahwa implementasi e-government didukung oleh regulasi yang kuat dan infrastruktur teknologi yang memadai. Dengan langkah-

Article History

Received: January 2025

Reviewed: January 2025

Published: January 2025

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/Musyteri.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musyteri



This work is licensed under

a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)



langkah ini, e-government dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas korupsi.

Kata Kunci: Transparansi, kemudahan penggunaan, efektivitas, *e-government*, pencegahan korupsi, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the influence of transparency, ease of use, and effectiveness on corruption prevention through e-government. Corruption is one of the biggest challenges faced by governments in various countries, including Indonesia. The implementation of e-government is considered a strategic innovation to improve transparency, efficiency, and accountability in public services, which can ultimately reduce the chances of corruption. A quantitative approach was used in this study, with data obtained through a Likert-based questionnaire distributed to 50 respondents from various regions in Indonesia. Respondents consisted of the general public, government employees, and business actors who use e-government services. The collected data were analyzed using SPSS software, which includes validity, reliability, descriptive analysis, and multiple linear regression tests. The results showed that transparency, ease of use, and effectiveness had a significant influence on corruption prevention. The ease of use variable had the greatest influence, followed by transparency and effectiveness. The resulting multiple linear regression model was able to explain 85% of the variation in corruption prevention, which confirms the importance of the three variables in supporting the success of e-government implementation. This study concludes that e-government is a strategic solution in eradicating corruption, especially through the provision of transparent, easy-to-use, and effective public services. Therefore, the government needs to continue to improve the design of user-friendly systems, provide open and integrated access to information, and ensure that the implementation of e-government is supported by strong regulations and adequate technological infrastructure. With these steps, e-government can be an effective instrument for creating a clean, accountable, and corruption-free government.

Keywords: *Transparency, ease of use, effectiveness, e-government, corruption prevention, Indonesia.*



PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan global yang menghambat pembangunan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi telah menjadi agenda prioritas, namun tingkat korupsi yang masih tinggi menunjukkan perlunya pendekatan baru yang lebih efektif. Berdasarkan laporan Transparency International (2022), Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih berada pada angka 34 dari 100, yang menunjukkan tingkat korupsi yang signifikan di berbagai sektor.

Salah satu inovasi yang dapat berkontribusi dalam pencegahan korupsi adalah penerapan *e-government*. *E-government*, atau pemerintahan berbasis elektronik, bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Menurut Putra dan Suparman (2020), *e-government* dapat mengurangi peluang korupsi melalui penghapusan interaksi langsung antara masyarakat dan pejabat pemerintah, sehingga meminimalkan kemungkinan suap dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, Hidayat dan Hapsari (2021) menyebutkan bahwa implementasi *e-government* yang terintegrasi dengan sistem pengawasan dapat secara signifikan menekan potensi pelanggaran administratif yang menjadi celah korupsi.

Implementasi *e-government* di Indonesia telah berlangsung selama beberapa tahun, seperti yang terlihat dalam inisiatif seperti Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), digitalisasi pengelolaan anggaran melalui SIKD telah meningkatkan efisiensi dan mengurangi penyimpangan anggaran pada tingkat daerah. Namun, efektivitas penerapan *e-government* tidak hanya bergantung pada teknologi yang diterapkan, tetapi juga pada faktor-faktor lain seperti transparansi sistem, kemudahan penggunaan, dan penerimaan masyarakat terhadap layanan tersebut (Hasanah, 2021).

Kemudahan penggunaan *e-government* juga menjadi salah satu aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Penelitian oleh Santoso dan Wibowo (2022) menemukan bahwa kompleksitas antarmuka pengguna pada sistem pelayanan digital dapat mengurangi tingkat adopsi masyarakat terhadap teknologi ini. Oleh karena itu, diperlukan desain sistem yang ramah pengguna untuk meningkatkan partisipasi publik dalam memanfaatkan layanan berbasis elektronik.

Selain itu, dukungan kelembagaan dan keterlibatan aktif masyarakat merupakan elemen krusial dalam memastikan keberhasilan *e-government*. Implementasi yang tidak didukung oleh kebijakan yang tegas dan sumber daya manusia yang kompeten dapat menghambat pencapaian tujuan pencegahan korupsi melalui *e-government*. Oleh karena itu, penting untuk menilai sejauh mana transparansi, kemudahan penggunaan, dan efektivitas *e-government* dapat berkontribusi pada pencegahan korupsi di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai hubungan antara transparansi, kemudahan penggunaan, dan efektivitas *e-government* terhadap pencegahan korupsi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih baik. Rumusan



masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pengaruh transparansi *e-government* terhadap pencegahan korupsi? Bagaimana pengaruh kemudahan penggunaan *e-government* terhadap pencegahan korupsi? Bagaimana pengaruh efektivitas *e-government* terhadap pencegahan korupsi? Penelitian ini memiliki ruang lingkup berupa subjek penelitian yang terdiri dari pengguna layanan *e-government* di Indonesia, yang mencakup masyarakat umum, pegawai pemerintah, dan pelaku usaha yang memanfaatkan sistem elektronik untuk berbagai keperluan. Variabel independen dalam penelitian ini mencakup transparansi, kemudahan penggunaan, dan efektivitas *e-government*, sedangkan variabel dependen adalah pencegahan korupsi. Lokasi penelitian dilakukan di beberapa instansi pemerintah yang telah menerapkan *e-government*, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mendapatkan data yang beragaeam.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa survei, kuesioner, dan studi literatur. Data penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarakan kepada responden yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis pengaruh transparansi *e-government* terhadap pencegahan korupsi. Menganalisis pengaruh kemudahan penggunaan *e-government* terhadap pencegahan korupsi. Menganalisis pengaruh efektivitas *e-government* terhadap pencegahan korupsi.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dengan menambah literatur dalam bidang *e-government* dan pencegahan korupsi serta menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengembangkan kebijakan *e-government* yang lebih efektif dan membantu instansi terkait dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik. Dari sisi sosial, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran teknologi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yang dirancang untuk menganalisis data numerik secara sistematis dan objektif. Metode kuantitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara variabel yang diteliti, yaitu transparansi, kemudahan penggunaan, efektivitas *e-government*, dan pencegahan korupsi.

Metode ini memungkinkan pengumpulan data dalam jumlah besar dari berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang pendidikan, usia, dan pengalaman berbeda. Pendekatan ini juga bertujuan untuk memberikan generalisasi hasil penelitian yang dapat diaplikasikan dalam konteks yang lebih luas, seperti implementasi kebijakan terkait *e-government* di Indonesia.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kuantitatif difokuskan pada pengujian hipotesis menggunakan kuesioner berbasis skala Likert. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang terukur terkait persepsi masyarakat terhadap efektivitas *e-government* sebagai instrumen dalam mencegah korupsi.



Lokasi Penelitian

Kuesioner disebarakan secara online kepada responden dari berbagai wilayah di Indonesia. Dari hasil pengumpulan data, sebanyak 50 responden berpartisipasi, dengan rentang usia <20 hingga 30 tahun. Pendidikan terakhir responden bervariasi dari SMA hingga Pascasarjana, dengan pengalaman yang berbeda-beda dalam menggunakan layanan *e-government*, mulai dari "Belum Pernah" hingga "Sering", seperti yang dijelaskan oleh Rachmawati dan Suryanto (2020). Mereka menegaskan bahwa pengumpulan data menggunakan kuesioner online memungkinkan peneliti untuk mendapatkan sampel yang lebih representatif secara geografis, mengingat luasnya wilayah Indonesia.

Teknik Pengumpulan data dan Analisis Data

Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disusun berdasarkan skala Likert 5 poin. Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner mencakup dimensi transparansi, kemudahan penggunaan, efektivitas *e-government*, dan pencegahan korupsi. Kuesioner ini disebarakan secara daring untuk menjangkau responden dari berbagai latar belakang dan wilayah.

Teknik analisis data yang terkumpul dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik SPSS. Analisis meliputi:

1. Uji Validitas dan Reliabilitas untuk memastikan bahwa kuesioner yang digunakan layak dan konsisten dalam mengukur variabel penelitian.
2. Analisis Deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan persepsi mereka terhadap e-government.
3. Analisis Regresi Linier Berganda untuk menguji hubungan kausal antara variabel independen (transparansi, kemudahan penggunaan, efektivitas) dengan variabel dependen (pencegahan korupsi).

HASIL DAN LUARAN PENELITIAN

Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana item kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini benar-benar mampu mengukur variabel yang dimaksud. Validitas setiap item diukur dengan korelasi antara skor item dengan skor total variabel. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua item memiliki nilai korelasi di atas ambang batas minimum 0,3. Hal ini menandakan bahwa setiap item kuesioner memiliki hubungan yang kuat dengan variabel yang diukur.

Sebagai contoh, item-item yang mengukur transparansi menunjukkan nilai korelasi rata-rata 0,6, yang menunjukkan bahwa responden dapat secara konsisten menilai sejauh mana transparansi platform e-government diterapkan. Validitas ini memastikan bahwa instrumen penelitian mampu menangkap persepsi responden secara akurat terhadap variabel transparansi, kemudahan penggunaan, efektivitas, dan pencegahan korupsi.



Uji Reliabilitas

Reliabilitas instrumen diuji dengan menggunakan *Cronbach's Alpha* untuk mengukur konsistensi internal antar item dalam kuesioner. Nilai *Cronbach's Alpha* yang diperoleh sebesar 0,85, yang berada jauh di atas batas minimum 0,7. Artinya, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sangat andal untuk mengukur variabel-variabel penelitian. Sebagai tambahan, nilai reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa jawaban responden cenderung konsisten, bahkan jika mereka diberikan pertanyaan serupa dalam konteks berbeda. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dari kuesioner dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut.

Analisis Deskriptif

Karakteristik Responden

Sebanyak 50 responden berpartisipasi dalam penelitian ini. Mayoritas responden berusia antara 20 hingga 25 tahun (60%), sedangkan sisanya berada dalam rentang usia <20 tahun (30%) dan 25–30 tahun (10%). Dari segi pendidikan, mayoritas responden memiliki latar belakang SMA/SMK (70%), sementara 30% lainnya memiliki tingkat pendidikan diploma atau sarjana. Selain itu, pengalaman menggunakan layanan e-government beragam, dengan 40% responden mengaku belum pernah menggunakan layanan tersebut, 30% pernah menggunakannya sekali, 20% menggunakannya kadang-kadang, dan hanya 10% yang sering menggunakan layanan ini. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun platform e-government sudah diperkenalkan, tingkat adopsinya masih memerlukan dorongan lebih lanjut.

Persepsi Responden terhadap Variabel Penelitian

Berdasarkan data kuesioner, persepsi responden terhadap variabel penelitian adalah sebagai berikut:

1. Transparansi (Rata-rata: 4,3)

Responden menilai bahwa platform e-government telah memberikan informasi yang transparan, seperti akses terhadap dokumen atau data pemerintah, dengan kategori tinggi. Ini menandakan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi publik melalui platform ini.

2. Kemudahan Penggunaan (Rata-rata: 4,6)

Variabel ini mendapatkan nilai rata-rata tertinggi, menunjukkan bahwa responden merasa nyaman menggunakan sistem *e-government* tanpa memerlukan pelatihan khusus. Navigasi yang intuitif dan fitur yang mudah diakses menjadi faktor utama dalam penilaian ini.

3. Efektivitas (Rata-rata: 4,4)

Efektivitas dinilai cukup tinggi oleh responden. Sistem *e-government* dinilai mampu meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian administrasi publik, seperti pembayaran pajak atau pengurusan dokumen resmi.

4. Pencegahan Korupsi (Rata-rata: 4,7)

Variabel ini memiliki nilai rata-rata tertinggi kedua. Responden menganggap bahwa *e-government* mampu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi, seperti suap atau penyalahgunaan wewenang, karena adanya transparansi dan pengurangan interaksi tatap muka dalam layanan public.



Variabel	N	Min	Maks	Rata-rata	Standar Deviasi
Transparansi	50	3	5	4.3	0.67
Kemudahan Penggunaan	50	4	5	4.6	0.52
Efektivitas	50	4	5	4.4	0.52
Pencegahan Korupsi	50	4	5	4.7	0.48

Tabel 1 Statistik Deskriptif

Analisis ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pandangan positif terhadap implementasi *e-government*, terutama dalam hal kemudahan penggunaan dan dampaknya terhadap pencegahan korupsi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen (transparansi, kemudahan penggunaan, efektivitas) terhadap variabel dependen (pencegahan korupsi). Dengan analisis ini, dapat diketahui variabel independen mana yang memiliki pengaruh paling besar terhadap pencegahan korupsi, serta seberapa besar kontribusi keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil Analisis Regresi

Berdasarkan analisis regresi linier berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1.2 + 0.35X_1 + 0.45X_2 + 0.30X_3$$

Di mana:

- Y = Pencegahan Korupsi
- X_1 = Transparansi
- X_2 = Kemudahan Penggunaan
- X_3 = Efektivitas

Variabel Bebas	Koefisien	p-Value	Interpretasi
Transparansi	0.35	0.02	Signifikan
Kemudahan Penggunaan	0.45	0.01	Signifikan
Efektivitas	0.30	0.03	Signifikan

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Nilai R-squared yang diperoleh sebesar 0,85, yang menunjukkan bahwa model regresi mampu menjelaskan 85% variasi dalam pencegahan korupsi melalui transparansi, kemudahan penggunaan, dan efektivitas.



Interpretasi Hasil

- Signifikansi Variabel: Semua variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan korupsi (p-value < 0,05).
- Kemudahan Penggunaan sebagai Faktor Utama: Dengan koefisien sebesar 0,45, kemudahan penggunaan memiliki pengaruh terbesar terhadap pencegahan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin mudah masyarakat menggunakan platform *e-government*, semakin besar potensi pengurangan praktik korupsi.
- Kekuatan Model: Nilai R-squared sebesar 0,85 menandakan bahwa model regresi ini sangat baik dalam memprediksi hubungan antar variabel.
- Hasil ini mempertegas bahwa implementasi *e-government* yang berfokus pada transparansi, kemudahan penggunaan, dan efektivitas dapat menjadi solusi strategis dalam mencegah korupsi di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh transparansi, kemudahan penggunaan, dan efektivitas terhadap pencegahan korupsi melalui e-government, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap upaya pencegahan korupsi. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terbuka dan akurat, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Kemudahan penggunaan menjadi faktor yang paling signifikan dalam memengaruhi pencegahan korupsi. Desain sistem yang ramah pengguna memudahkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan e-government tanpa hambatan teknis, sehingga mengurangi interaksi langsung dengan pejabat dan potensi suap. Selain itu, efektivitas e-government juga berkontribusi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih melalui penyederhanaan proses administrasi dan peningkatan efisiensi layanan publik. Model regresi linier berganda menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut mampu menjelaskan 85% variasi dalam pencegahan korupsi, yang menandakan bahwa e-government merupakan solusi strategis dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

SARAN

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas e-government. Pertama, pemerintah perlu terus meningkatkan keterbukaan informasi dengan menyediakan akses yang lebih luas dan mudah dipahami masyarakat serta memastikan pengawasan terhadap implementasi sistem berjalan dengan baik. Kedua, desain sistem perlu diperbaiki dengan fokus pada kemudahan penggunaan, sehingga dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai latar belakang tanpa kesulitan teknis. Ketiga, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih masif mengenai manfaat dan cara penggunaan e-government untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama di daerah yang belum sepenuhnya mengenal sistem ini.



Selain itu, efisiensi dan integrasi sistem perlu ditingkatkan dengan mengintegrasikan berbagai layanan publik ke dalam satu platform yang terpusat untuk mempermudah akses pengguna sekaligus meningkatkan efisiensi proses administratif. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan regulasi yang kuat dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang merata di seluruh Indonesia untuk memastikan keberhasilan implementasi e-government. Terakhir, partisipasi masyarakat dalam evaluasi dan pengembangan sistem harus terus didorong agar layanan e-government dapat berkembang sesuai kebutuhan pengguna.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, keluarga, teman-teman, dan semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan dan penulisan peneliti ini untuk di jadikan jurnal ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2020). Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Diakses dari <https://www.bpkp.go.id/>.
- [2] Hasanah, S. (2021). Faktor-Faktor Pendukung Implementasi E-Government. Diakses dari <https://www.researchgate.net/>.
- [3] Hidayat, M., & Hapsari, R. (2021). Integrasi Sistem Pengawasan dalam E-Government. Diakses dari <https://journal.ui.ac.id/>.
- [4] *Journal of E-Government Studies and Best Practices*. (2022). *Studi Kasus Implementasi E-Government di Indonesia*. Diakses dari <https://www.ejournals.org/>.
- [5] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). Strategi Digitalisasi dalam Pemerintahan. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id/>.
- [6] Putra, A., & Suparman, R. (2020). Peran E-Government dalam Meningkatkan Transparansi dan Efisiensi. Diakses dari <https://repository.unair.ac.id/>.
- [7] Putra, F., & Kurniawan, A. (2020). Dampak E-Government terhadap Pencegahan Korupsi. Diakses dari <https://repository.ugm.ac.id/>.
- [8] Transparency International. (2022). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Diakses dari <https://www.transparency.org/>.